

The Impact of Teacher Salary Realization on the Quality of Islamic Education: A Literature Review of Educational Financing Management

Nasrin Hasibua¹, Hamdi Abdul Karim², Jefri Hasibuan³, Ali Mustopa Yakub Simbolon⁴

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia^{1,2,4}

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia³

Email: nasrinhasibuan24@gmail.com

Abstract

Teacher welfare is a major concern in improving the quality of Islamic education. Low welfare, both financially and non-financially, negatively impacts teacher motivation and performance in the learning process. This study aims to analyze the impact of teacher salary realization on the quality of Islamic education. This research uses a qualitative approach through literature review, reviewing more than 20 academic sources, including scientific journals, books, and related policy documents. The results indicate that teacher salaries, as a form of compensation, play a crucial role in shaping teacher welfare and professionalism. In the Islamic context, the salary system is governed by the *ijarah* principle, which emphasizes fairness and equity. This study concludes that effective, equitable, and sustainable financial management is essential to ensure teacher welfare and improve the overall quality of Islamic education.

Keywords: Teacher Salary, Teacher Welfare, Quality of Islamic Education, Financing Management



Licensees may copy, distribute, display and perform the work and make derivative works and remixes based on it only if they give the author or licensor the credits (attribution) in the manner specified by these. Licensees may copy, distribute, display, and perform the work and make derivative works and remixes based on it only for [non-commercial](#) purposes.

Pendahuluan

Pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan peradaban bangsa, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks ini, mutu pendidikan menjadi tolok ukur utama keberhasilan sistem pendidikan nasional. Salah satu indikator penting mutu pendidikan adalah kualitas guru sebagai pelaku utama dalam proses pembelajaran. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak guru, khususnya di lembaga pendidikan Islam, yang menghadapi tantangan kesejahteraan. (Mesiono et al., 2021).

Permasalahan kesejahteraan guru menjadi isu sentral yang berdampak langsung terhadap motivasi, kinerja, dan profesionalisme guru dalam menjalankan tugasnya (Supriani et al., 2022). Kesejahteraan yang rendah tidak hanya memengaruhi semangat mengajar, tetapi juga menghambat pencapaian tujuan pendidikan secara optimal. Dalam konteks manajemen pendidikan, kesejahteraan guru sangat bergantung pada sistem pembiayaan yang diterapkan oleh lembaga pendidikan, baik dari aspek perencanaan, pengalokasian, maupun pengelolaan sumberdana. (Mesiono dan Haidir, 2020). Salah satu komponen penting dalam pembiayaan pendidikan adalah gaji guru. Gaji bukan sekadar balas jasa, tetapi juga menjadi representasi penghargaan terhadap peran dan tanggung jawab guru (Jemani, 2023). Dalam perspektif Islam, pemberian gaji memiliki nilai moral dan spiritual yang diatur melalui prinsip keadilan dalam akad *ijarah* (Nurmadiyah, 2020). Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan pendidikan Islam harus mempertimbangkan aspek keadilan, kelayakan, dan keberlanjutan dalam menjamin kesejahteraan guru.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara konseptual hubungan antara realisasi gaji guru dan mutu pendidikan Islam melalui pendekatan studi literatur. Fokus kajian diarahkan pada analisis terhadap konsep kesejahteraan guru, sistem pembiayaan dalam pendidikan Islam, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk mengidentifikasi, menelaah, dan mensintesis temuan-temuan sebelumnya yang relevan dengan gaji dan kesejahteraan guru dalam pendidikan Islam. Sumber data berasal dari jurnal ilmiah, buku teks, laporan penelitian, dan peraturan perundang-undangan (Adlini et al., 2022).. Studi ini bertujuan membangun pemahaman konseptual yang komprehensif dan mengungkap hubungan antara kesejahteraan guru dan mutu pendidikan.

Studi literatur ini akan memberikan dasar pemahaman yang kuat terkait konsep gaji dan kesejahteraan guru dalam konteks pendidikan Islam. Penelitian ini juga dapat merinci perbandingan antara pandangan berbagai peneliti, mengidentifikasi tren atau perubahan dalam perspektif tersebut, dan menyajikan sintesis informasi yang dapat mendukung pemahaman yang lebih komprehensif (Mustopa dan Iswantir, 2023).

Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

a. Konsep Gaji dan Kesejahteraan Guru

Gaji adalah kompensasi finansial yang diterima guru atas tugas profesionalnya. Dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dijelaskan bahwa guru berhak atas penghasilan layak, termasuk gaji pokok, tunjangan profesi, dan tunjangan fungsional. Dalam Islam, konsep upah dibahas dalam ijarah, yakni akad atas jasa dengan kompensasi yang adil dan proporsional. Hal ini mencerminkan pentingnya keadilan dalam hubungan kerja antara guru dan institusi pendidikan. Islam menekankan bahwa pekerjaan yang dilakukan harus dihargai dengan layak sebagai bentuk penghormatan terhadap profesi dan tanggung jawab guru (Wardhani et al., 2022).

Kesejahteraan guru tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah gaji yang diterima, tetapi juga oleh berbagai aspek lain seperti lingkungan kerja yang kondusif, kepastian karier, dukungan sosial, serta keseimbangan kehidupan kerja dan pribadi. Sejumlah studi menunjukkan bahwa kesejahteraan yang komprehensif akan meningkatkan keterlibatan guru dalam proses pembelajaran dan pengembangan siswa secara optimal. Dalam konteks pendidikan Islam, kesejahteraan guru juga berhubungan erat dengan nilai-nilai spiritual, tanggung jawab moral, dan ikhlas dalam menjalankan amanah pendidikan (Nurhayati & Rahmat, 2023).

b. Realitas Kesejahteraan Guru

Masih banyak guru di lembaga pendidikan Islam yang belum menikmati kesejahteraan memadai. Kesejahteraan tidak hanya mencakup aspek finansial tetapi juga kepastian karir, penghargaan, dan hubungan kerja yang harmonis. Rendahnya kesejahteraan dapat melemahkan semangat kerja dan berpengaruh negatif terhadap kinerja guru. Dalam praktiknya, ketimpangan kesejahteraan juga disebabkan oleh ketidaksesuaian antara beban kerja dan gaji yang diterima. Sertifikasi guru, yang diharapkan menjadi solusi, belum sepenuhnya menjamin peningkatan kesejahteraan secara merata. Selain itu, dukungan psikologis, pengembangan karier, dan lingkungan kerja yang sehat juga merupakan bagian integral dari kesejahteraan guru (Wahyuni, 2017).

Beberapa tantangan yang dihadapi guru meliputi: (1) gaji pokok yang rendah dan sering terlambat dibayarkan; (2) tidak adanya sistem penghargaan yang jelas atas prestasi kerja; (3) minimnya akses terhadap pelatihan dan pengembangan profesional berkelanjutan; dan (4) kurangnya perlindungan hukum dan jaminan sosial bagi tenaga pendidik non-PNS. Realitas ini membuat banyak guru bekerja dalam tekanan, yang berakibat pada rendahnya motivasi dan produktivitas kerja.

c. Pengaruh terhadap Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan berkorelasi dengan kualitas kinerja guru. Guru yang sejahtera cenderung lebih fokus, termotivasi, dan profesional dalam mengajar. Oleh karena itu, pembiayaan yang mendukung kesejahteraan guru adalah investasi penting dalam peningkatan mutu pendidikan. Pendidikan yang bermutu tidak hanya ditentukan oleh kurikulum dan fasilitas, tetapi juga oleh semangat dan kompetensi guru dalam melaksanakan tugasnya (Hariyanto, 2020). Apabila guru merasa dihargai dan dipenuhi hak-haknya, mereka akan memberikan kontribusi maksimal dalam meningkatkan kualitas peserta didik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepuasan kerja guru berbanding lurus dengan prestasi belajar siswa.

Lebih lanjut, guru yang merasa aman dan dihargai secara ekonomi dan sosial memiliki kecenderungan lebih besar untuk menerapkan pendekatan pembelajaran inovatif, aktif, dan berpusat pada siswa (Dewi, 2022). Hal ini turut meningkatkan atmosfer kelas yang menyenangkan, interaktif, dan produktif. Kualitas interaksi guru-siswa yang baik menjadi salah satu indikator penting dalam menilai mutu pendidikan, terutama dalam konteks pendidikan Islam yang juga menekankan aspek moral dan spiritual.

d. Strategi Peningkatan

Strategi peningkatan kesejahteraan guru dapat dilakukan melalui: (a) peningkatan alokasi anggaran pendidikan oleh pemerintah dan yayasan, (b) optimalisasi program sertifikasi dan pelatihan berkelanjutan yang relevan dengan kebutuhan guru, (c) reformasi sistem penggajian berbasis prestasi dan transparansi, dan (d) pemberdayaan kepala sekolah sebagai pemimpin transformasional yang mampu menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif (Basith, 2017). Selain itu, penting juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberlanjutan pembiayaan pendidikan, termasuk program dana abadi pendidikan dan pemberdayaan zakat, infaq, dan wakaf untuk mendukung kesejahteraan guru di lembaga pendidikan Islam.

Diperlukan pendekatan manajemen yang inovatif dan inklusif dalam pembiayaan pendidikan. Model kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat menjadi alternatif strategis. Yayasan pendidikan dapat menjalin kemitraan dengan lembaga zakat, BAZNAS, atau institusi wakaf produktif untuk membentuk sistem dukungan berkelanjutan terhadap tenaga pendidik. Di sisi lain, peran kepala sekolah sebagai manajer strategis harus diperkuat dengan pelatihan kepemimpinan, pengelolaan anggaran, serta kemampuan membangun jejaring sosial dan profesional (Suherman, 2019).

Penggunaan teknologi juga bisa diintegrasikan untuk mendukung efisiensi manajemen pembiayaan. Aplikasi sistem manajemen informasi pendidikan (EMIS) yang terintegrasi dengan data kesejahteraan guru, absensi, beban kerja, serta prestasi kerja dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran (Fermansyah dan Murtafiah, 2022).

2. Discussions

Dalam konteks pendidikan pengertian mutu dalam hal ini mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dalam proses pendidikan terlibat berbagai input seperti bahan ajar, (kognitif, afektif, psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai kemampuan guru), sarana sekolah, dukungan administrasi, sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Mutu dalam konteks hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai sekolah pada kurun waktu tertentu, kalau sekarang diukur dengan akreditasi sekolah, disamping juga hasil yang dicapai murid berupa hasil kemampuan akademis (misalnya ulangan umum, nilai ujian tengah dan akhir semester). Atau prestasi dibidang lain seperti olah raga, seni, keterampilan, atau seperti suasana disiplin, keakraban saling hormat menghormati, kebersihan dan sebagainya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bicara pendidikan bukanlah upaya sederhana, melainkan suatu kegiatan dinamis dan penuh tantangan. Pendidikan selalu berubah seiring dengan perubahan jaman. Oleh karena itu pendidikan senantiasa memerlukan upaya perbaikan dan peningkatan mutu sejalan dengan semakin tingginya kebutuhan dan tuntutan

kehidupan masyarakat. Ada beberapa indikator yang dapat meningkatkan mutu pendidikan yaitu (Heriyanto, 2019).

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki peranan tertentu dalam mendukung mutu pendidikan. Dukungan pemerintah pusat erat kaitannya dengan standarisasi, dukungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kaitannya dengan pelayanan anggaran dan fasilitas sekolah. Selain penyediaan sarana dan sumberdaya manusia, peranan lainnya dari pemerintah yang tak kalah pentingnya ialah memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan bebas dari kepentingan individu, kelompok, golongan, intervensi serta hal-hal lainnya yang dapat mengganggu dan menghambat tercapainya tujuan pendidikan yang bermutu. Untuk itu maka diperlukan komitmen yang kuat dan berkelanjutan dari pemerintah baik pemerintah pusat, provinsi maupun daerah.

Guru selaku tenaga pendidik adalah ujung tombak dalam dunia pendidikan, hal ini dikarenakan bahwa gurulah yang berhadapan langsung dengan siswa atau peserta didik. Oleh karena itu guru harus mampu bekerja secara baik dan profesional sehingga peserta didik yang dihasilkan akan memiliki kompetensi sesuai dengan visi dan misi lembaga pendidikan. Dalam hal ini UUD No 14 Tahun 2005 mengungkapkan tentang Guru dan Dosen pada pasal 4 ditegaskan bahwa guru sebagai agen pembelajaran memiliki fungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara baik, guru harus memiliki syarat tertentu, salah satu dari kompetensi tersebut adalah kompetensi dan profesionalisme guru. Untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, guru tidak hanya bisa dan hafal bahan pelajaran dan mempunyai kemampuan teknis edukatif, tetapi juga memiliki kepribadian dan berintegritas yang tinggi sehingga dapat di andalkan dan menjadi panutan oleh peserta didik, keluarga, masyarakat (Rochaendi et al., 2022).

Kurikulum merupakan salah satu perangkat rencana dan pengaturan tentang tujuan, isi dan bahan pelajaran yang menjadi pedoman pada proses pembelajaran, sebagaimana yang dijelaskan oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 mengatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum adalah suatu sistem yang di dalamnya memuat komponen-komponen tertentu. Komponen-komponen itu kurikulum terdiri dari tujuan, isi, metode dan evaluasi.

Tujuan utama dalam pendidikan adalah lulusan yang berkualitas, sama halnya yang di jelaskan pada pasal 2 UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menerangkan bahwa Pendidikan Nasional Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian pada pasal 3 di jelaskan bahwa peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak Mulia, Sehat, Berilmu, Cakap, Kreatif, Mandiri dan Menjadi Warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Budaya organisasi yang dimaksudkan disini adalah salah satu isu utama dalam penelitian akademik dan pendidikan, teori organisasi serta dalam praktek manajemen. Alasannya adalah dimensi budaya dalam organisasi merupakan hal yang sentral dalam semua aspek kehidupan berorganisasi. Budaya erat berhubungan dengan manusia, dan oleh karena itu karena berhubungan dengan manusia secara langsung akan berhubungan dengan sejarah khusus manusia dalam kehidupan bersama, bahasa manusia berhubungan dengan komunikasi, kebiasaan, adat istiadat dan nilai nilai yang terkandung dalam kehidupan manusia.

Kebudayaan adalah sesuatu yang dinamis, berubah dari waktu ke waktu dan sesuai dengan tempat dan keadaan. Walaupun budaya membentuk pemikiran, pengalaman, makna dan kesempatan anggotanya yang telah tersedia bagi anggota organisasi, mereka tidak penerima pasif dari budaya, melainkan seperti aktor, membentuk dan memproyeksikan budaya ke masa depan.

Dukungan masyarakat dan orang tua siswa terhadap sekolah adalah usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan. Besarnya peranan yang harus dilakukan oleh masyarakat dan orang tua tentu harus terus ditingkatkan oleh pihak sekolah. Sekolah wajib menjaga hubungan baik dan harmonis dengan masyarakat dan orang tua siswa guna untuk membantu usaha-usaha sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Permasalahan pendidikan cukup kompleks terutama masalah rendahnya mutu pendidikan. Banyak indikator yang menunjukkan rendahnya mutu pendidikan itu, diantaranya adalah rendahnya mutu Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Pemerintah telah berupaya memecahkan masalah ini, tetapi masalah selanjutnya akan muncul pula. Karena yang dipecahkan adalah masalahnya, bukan akar masalahnya. Masalah itu tetap akan muncul lagi sebab akarnya tidak dihilangkan. Bagaikan lalang, begitu dipangkas, datang hujan, tumbuh lagi. Dan demikian seharusnya, silih berganti, masalahnya terus muncul. Ada lima faktor yang menjadi akar permasalahan rendahnya kualitas pendidikan nasional, kelima faktor itu adalah (Tanjung et al., 2022).

Rendahnya komitmen pemerintah kepada dunia pendidikan. Secara konstitusional komitmen nasional kepada dunia pendidikan sangat tinggi. Hal itu tersirat dari ungkapan tujuan bangsa Indonesia adalah mencerminkan kehidupan bangsa. Ungkapan itu tersirat pada pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh UUD 1945, dan GBHN. Namun dalam operasionalnya, bertolak belakang dengan itu. Dengan kata lain, komitmen pemerintah kepada dunia pendidikan rendah, hal ini dapat dilihat dari belanja negara pada sektor pendidikan sangat rendah, dibanding dengan negara Malaysia terutama pendidikan Islam lebih rendah dari pada pendidikan umum.

Minimal ada 3 persoalan mendasar yang dipersepsikan secara keliru oleh masyarakat, yaitu: "apa pendidikan", apa mutu pendidikan", dan apa produk pendidikan". Pemaknaan kepada pendidikan adalah: "proses bantuan kepada anak didik menuju kedewasaan." Persepsi seperti itu melahirkan sikap memperlakukan anak sebagai organisme yang memerlukan bantuan, lemah, dan sebagai objek pendidikan. Guru menjadi subjek, serba mengetahui, dan memberikan bantuan. Kalau tidak dibantu pendidikan, anak tidak akan bisa dewasa. Demikian juga dengan "mutu", masyarakat selalu mengartikan "mutu" pendidikan dengan prestasi IP atau IPK, atau nilai ujian Akhir, bahkan lulus UMPTN, sekolah yang paling banyak siswanya masuk ke PTN adalah sekolah yang bermutu. Maka suburlah bimbingan "test" dan "bimbingan studi", supaya siswa dapat nilai tinggi dan bisa lulus UMPTN. Mungkin ini gejala aneh dan tidak pernah terlihat di negara yang maju dunia pendidikannya. Sama saja dengan itu, kekeliruan juga terjadi pada makna filosofis "produk" pendidikan. "Produk" pendidikan selalu diartikan dengan lulusan atau tamatan sekolah atau madrasah. Padahal lulusan itu bukanlah 100% hasil dari proses pendidikan dan pembelajaran di sebuah lembaga pendidikan. Hanya sedikit sekali peran lembaga pendidikan, dan dari yang sedikit itu, hanya satu aspek saja yang dominan, yaitu aspek kognitif (Sholeh, 2021).

Lemahnya pemberdayaan tenaga pendidik, misalnya guru, dapat dilihat dari beberapa indikator, diantaranya: (1) Latihan pra jabatan Latihan pra jabatan pada sistem kepegawaian, tidak memberikan manfaat yang besar bagi tugas jabatan tenaga pendidik; (2) Penataran, latihan, dan lain-lain, adalah ajang proyek yang intinya adalah laporan administrasi keuangan, bukan kualitas peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga pendidik; (3) Kesejahteraan tenaga pendidik. Gaji guru adalah yang paling rendah dan banyak potongannya.

Manajemen pendidikan bersifat sentralistik, strukturalistik, birokratik. Sistem pembelajaran bersifat paternalistik, kharismatik, militeristik, dan monolog, pembelajaran seperti ini guru sangat menentukan, siswa pasif, dan tidak kreatif. Itulah kelima hal yang menjadi akar permasalahan pendidikan nasional. Selama ini pemecahan persoalan pendidikan berada pada pokok masalah bukan pada akar masalahnya. Jadi setiap kali diatasi masalah, maka pada saatnya akan muncul lagi sebab akar masalahnya tidak dituntaskan.

Dalam menghadapi berbagai permasalahan di atas secara garis besar ada tiga langkah mendasar atau langkah yang seharusnya mendapat perhatian para pemikir, penentu kebijakan, praktis dan manajer atau pemimpin lembaga pendidikan, yaitu (Amirulloh, 2021):

Pertama, adalah membangun kesadaran pada semua lapisan masyarakat. Selama ini kurikulum dianggap sebagai penentu keberhasilan pendidikan, termasuk pendidikan Islam. Oleh karena itu, perhatian para guru, dosen, kepala sekolah/madrasah, ketua, rektor mau praktisi pendidikan terkonsentrasi pada kurikulum. Padahal, kurikulum bukanlah penentu utama. Dalam kasus pendidikan di Indonesia misalnya, problem paling besar yang dihadapi bangsa ini sesungguhnya bukan problem kurikulum meskipun bukan berarti kurikulum tidak menimbulkan problem. Namun, masalah kesadaran merupakan problem yang paling besar yaitu lemahnya kesadaran untuk berpartisipasi, kesadaran untuk sukses, kesadaran untuk meningkatkan SDM, kesadaran untuk menghilangkan kebodohan, maupun kesadaran untuk berbuat yang terbaik. Jadi, rasa kesadaran itulah yang mestinya harus dimiliki dan ditanamkan pada semua lapisan masyarakat.

Kedua, adalah penguatan epistemologi pendidikan Islam. Epistemologi ini melebihi sarana-sarana lainnya, epistemologi ini merupakan instrumen memproses, menyusun, merumuskan, dan membentuk bangunan ilmu pendidikan Islam. Epistemologi inilah yang bertugas menggali, menemukan, dan mengembangkan pengetahuan pendidikan Islam. Jadi kunci untuk mengatasi kelemahan-kelemahan bangunan pendidikan Islam secara konseptual-teoritis yang selama ini merupakan adaptasi terhadap bangunan konsep pendidikan yang digagas para ilmuwan Barat adalah epistemologi pendidikan Islam. Namun, salah satu kelemahan umat Islam juga terdapat pada wilayah epistemologi pendidikan Islam ini sehingga harus dilakukan penguatan-penguatan secara sistematis dengan membangun konsep-konsep teoritis pendidikan Islam, yaitu: metode rasional, metode intuitif, metode dialogis, metode komparatif, dan metode kritik.

Ketiga, adalah penguatan manajemen pendidikan Islam, secara teoritis atau sebagai ilmu adalah epistemologi pendidikan Islam, maka kunci untuk memajukan pendidikan Islam secara aplikatif atau secara kelembagaan adalah manajemen pendidikan Islam. Sebagaimana dalam kasus epistemologi umat Islam khususnya para pimpinan lembaga pendidikan Islam juga lemah dalam wilayah manajemen. Maka mereka harus diperkuat kemampuannya dalam manajemen pendidikan Islam.

Demikianlah tiga langkah ini sebagai strategi kunci atau strategi penentu yang berupaya memberi solusi pada tiga latar, yaitu pembangunan kesadaran pada semua lapisan masyarakat memberi solusi mengenai permasalahan mental maupun perilaku orang-orang yang terkait dengan pendidikan Islam, penguatan epistemologi pendidikan Islam memberikan solusi pada latar kelangkaan bangunan konseptual teoritis tentang pendidikan Islam sebagai ilmu, sedangkan manajemen pendidikan Islam memberikan solusi pada latar aplikasi pendidikan Islam secara institusional.

Simpulan

Temuan Mendasar: Penelitian ini menunjukkan bahwa realisasi gaji guru merupakan komponen esensial dalam manajemen pembiayaan pendidikan Islam yang secara langsung memengaruhi kesejahteraan guru dan mutu pendidikan. Gaji yang layak tidak hanya meningkatkan profesionalisme dan motivasi kerja guru, tetapi juga memperkuat kualitas proses pembelajaran di lembaga pendidikan Islam. Prinsip ijarah dalam Islam memberikan dasar moral dan normatif bagi pelaksanaan sistem penggajian yang adil dan proporsional.

Implikasi: Temuan ini menegaskan bahwa upaya peningkatan mutu pendidikan Islam tidak dapat dipisahkan dari reformasi sistem pembiayaan yang berfokus pada kesejahteraan guru. Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu menyusun kebijakan yang menekankan transparansi anggaran, efisiensi distribusi dana, dan pemberian insentif berbasis kinerja. Sinergi antara negara, masyarakat, dan institusi pendidikan sangat diperlukan untuk menjamin keberlanjutan sistem ini.

Batasan: Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur sehingga belum menyentuh data empiris secara langsung. Fokus kajian terbatas pada konsepsi dan hubungan teoritis antara gaji guru dan mutu pendidikan tanpa melakukan uji validitas terhadap konteks spesifik di lapangan.

Penemuan Masa Depan: Penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada studi kuantitatif atau kualitatif lapangan yang menguji hubungan antara kesejahteraan guru dan performa pendidikan secara lebih mendalam. Selain itu, eksplorasi terhadap penerapan prinsip-prinsip ijarah dalam sistem penggajian guru di madrasah atau pesantren dapat menjadi kontribusi baru dalam pengembangan manajemen pembiayaan pendidikan Islam.

Daftar Rujukan

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980.
- Amirulloh, C. I. (2021). *Hubungan antara manajemen pembiayaan dan mutu pendidikan diniyah penelitian di Madrasah Diniyah Takmiliah Awalayah se-Kabupaten Bandung*. etheses.uinsgd.ac.id.
- Basith, A. F. A. (2017). *Manajemen pembiayaan pendidikan dan dampaknya terhadap mutu pendidikan: Penelitian di Madrasah Aliyah Multiteknik Asih Putera Kota Cimahi Jawa Barat*. etheses.uinsgd.ac.id.
- Dewi, N. P. R. C. (2022). ... KEPALA SEKOLAH DAN PEMBIAYAAN SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) TERHADAP MUTU PENDIDIKAN DI SMK NEGERI 1 repo.undiksha.ac.id.
- Fermansyah, F., & Murtafiah, N. H. (2022). MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN (ANALISIS KONSEP DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN). *UNISAN JURNAL*.
- Hariyanto, A. (2020). PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TERHADAP PENGEMBANGAN MUTU PENDIDIKAN: Efektivitas Program BPOPP, Managemen Pembiayaan, dan Mutu Pendidikan. *Journal of Education Management and Learning*.
- Heriyanto, H. (2019). Pengaruh Rekrutmen Siswa Dan Pembiayaan Pendidikan Terhadap Mutu Proses Pembelajaran Smk Negeri Di Wilayah Barat Kabupaten Indramayu. *Edum Journal*.
- Jemani, A. (2023). KEBIJAKAN DAN MODEL PEMBIAYAAN MADRASAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA. *Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*.
- Mesiono, M., & Haidir, H. (2020). Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Analisis Konsep dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan). *Hikmah*.
- Mesiono, M., Suswanto, S., Lubis, R. R., & Haidir, H. (2021). Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Aliyah Imam Muslim Serdang Bedagai. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 13(1), 119–134.
- Mustopa, A. M. Y. S., & Iswanti, I. (2023). Pengembangan Manajemen Lembaga Pendidikan Islam di Era Disrupsi. *Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan*, 15(1), 1–12.
- Nurhayati, N., & Rahmat, P. S. (2023). Kebijakan dan Implementasi Manajemen Pembiayaan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah. *Journal of Economics and Business*
- Nurmadiyah, N. (2020). Kontribusi Manajemen Pembiayaan dan Iklim Madrasah terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah Aliyah Negeri di Aceh Utara. *Al-Madaris Jurnal Pendidikan Dan Studi*
- Rochaendi, E., Aminudin, A., Kiyamudin, E., & Wahyudi, A. (2022). Pengaruh Kepemimpinan Strategik Dan Manajemen Pembiayaan Terhadap Mutu Pendidikan. ... *Dan Manajemen Pendidikan*.
- Sholeh, A. H. A. (2021). PENDIDIKAN (BPOPP) DAN MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TERHADAP PENGEMBANGAN MUTU PENDIDIKAN DI SMK DARUL ULUM II AL *Jurnal Magister*.
- Suherman, J. (2019). Strategi Pembiayaan dan Manajemen Mutu Pendidikan: Studi Kualitatif pada Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia Bandung. *EKUBIS*.
- Supriani, Y., Tanjung, R., Mayasari, A., & Arifudin, O. (2022). Peran Manajemen Kepemimpinan dalam

- Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam. *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(1), 332–338.
- Tanjung, S. H., Muazza, M., & Syuhada, S. (2022). ... *Kepemimpinan, Pembiayaan dan Continuing Professional Development (CPD) Terhadap Kinerja Guru Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pada Sekolah SMKN* repository.unja.ac.id.
- WAHYUNI, S. R. I. (2017). *PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI MANAJEMEN PEMBIAYAAN Pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Kediri II dan Madrasah Tsanawiyah Negeri* repo.iain-tulungagung.ac.id.
- Wardhani, A. S., Abdullah, G., & Miyono, N. (2022). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dan Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Prakarsa*